



**Pertaruhan Presiden
Prabowo dan Tantangan
Menteri Purbaya:
Pengadaan Alutsista dalam
Satu Tahun Pemerintahan
Prabowo Subianto**

22 Oktober 2025

Pembelian Alutsista 2025

Ketergantungan terhadap asing kian meningkat, tetapi Alutsista Indonesia makin canggih



Kapal Perang Permukaan
Light Frigate I-Class
Rp18,21 triliun



Pesawat Tempur
Gen 4.5 J-10
Rp26,49 triliun



Pesawat Tempur
Gen 5.0 KAAN
Rp19,86 triliun

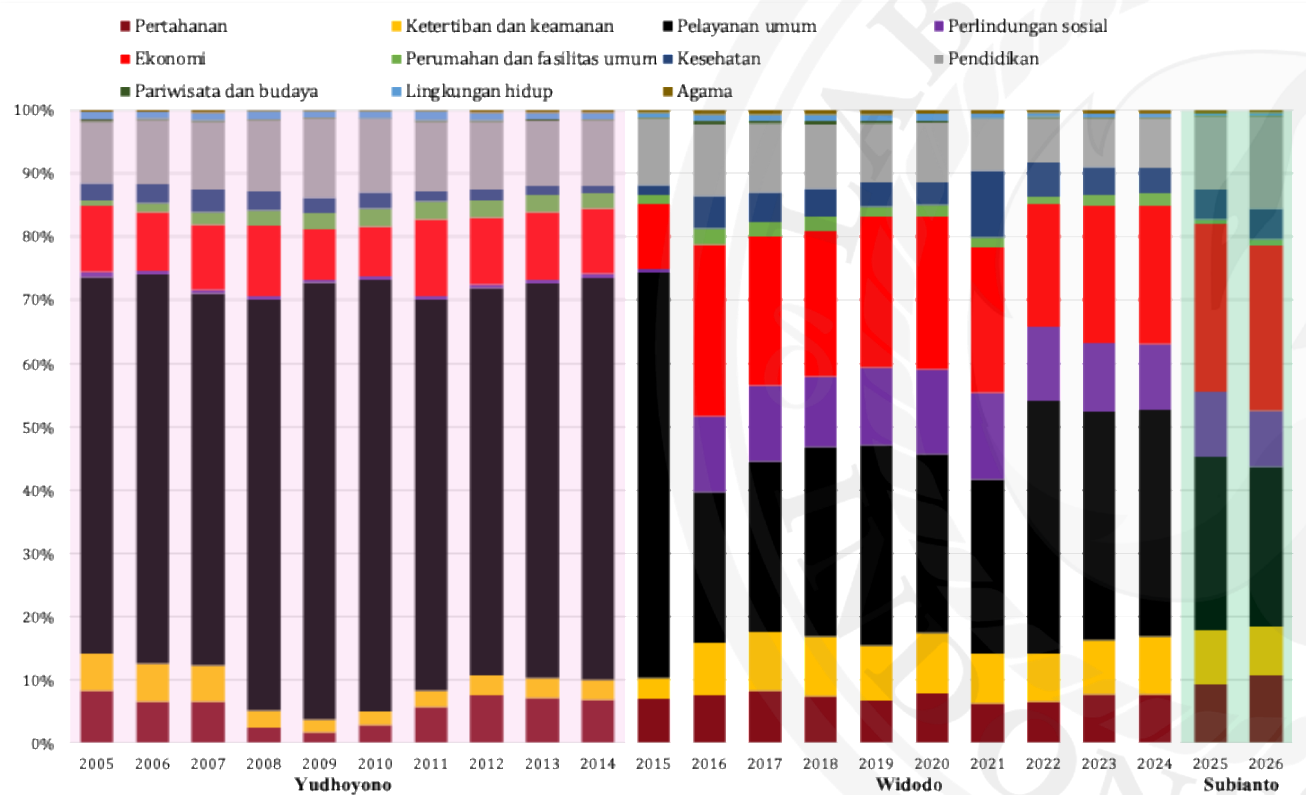


Kapal Induk (bekas)
Garibaldi
Rp7,45 triliun

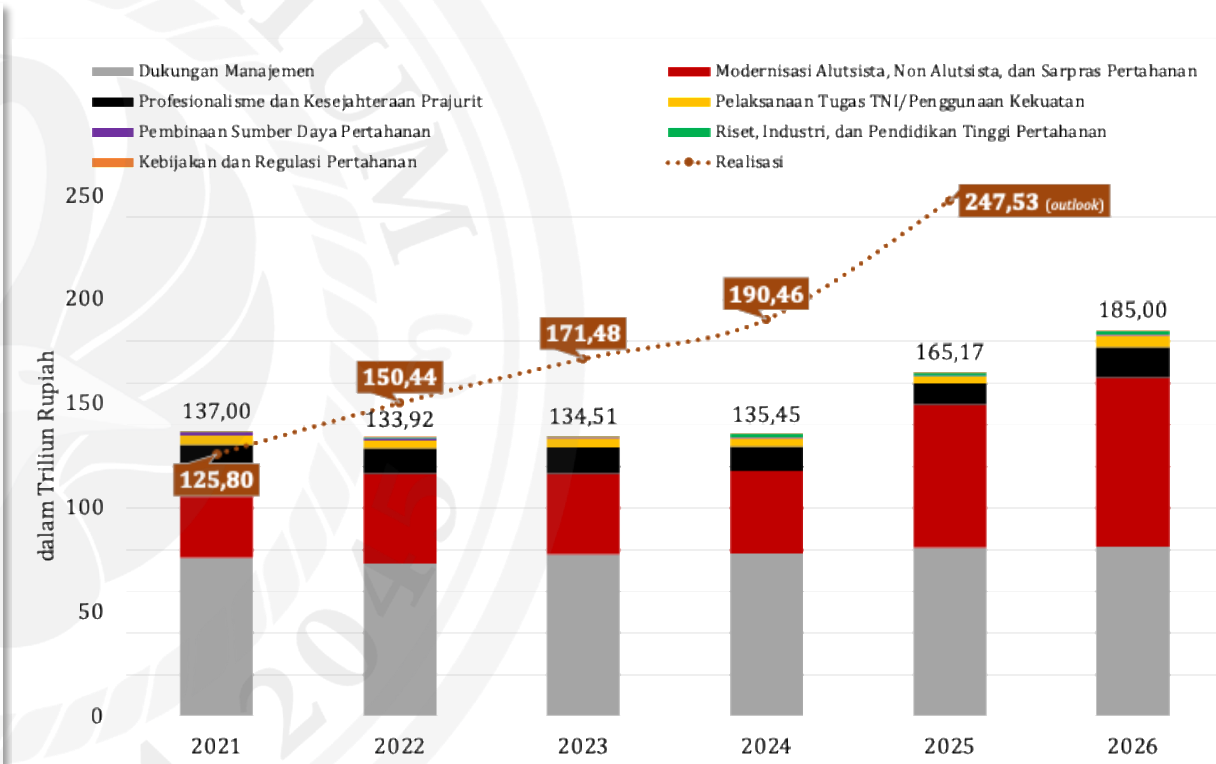
Tren Kapasitas APBN

Fungsi pertahanan berdasarkan RAPBN 2026 berhasil menembus 1,5% PDB meski di atas tumpukan utang asing

Alokasi APBN Berdasarkan Fungsi



Alokasi Rancangan Anggaran Pertahanan



Tantangan Modernisasi Pertahanan Indonesia

Ambisi besar dan risiko besar menjadi resep keseimbangan *gun vs butter* Presiden Prabowo Subianto

Alokasi Anggaran Program Prioritas 2026

**Makan Bergizi Gratis
Rp335 triliun**



**Ketahanan Energi
Rp402,4 triliun**

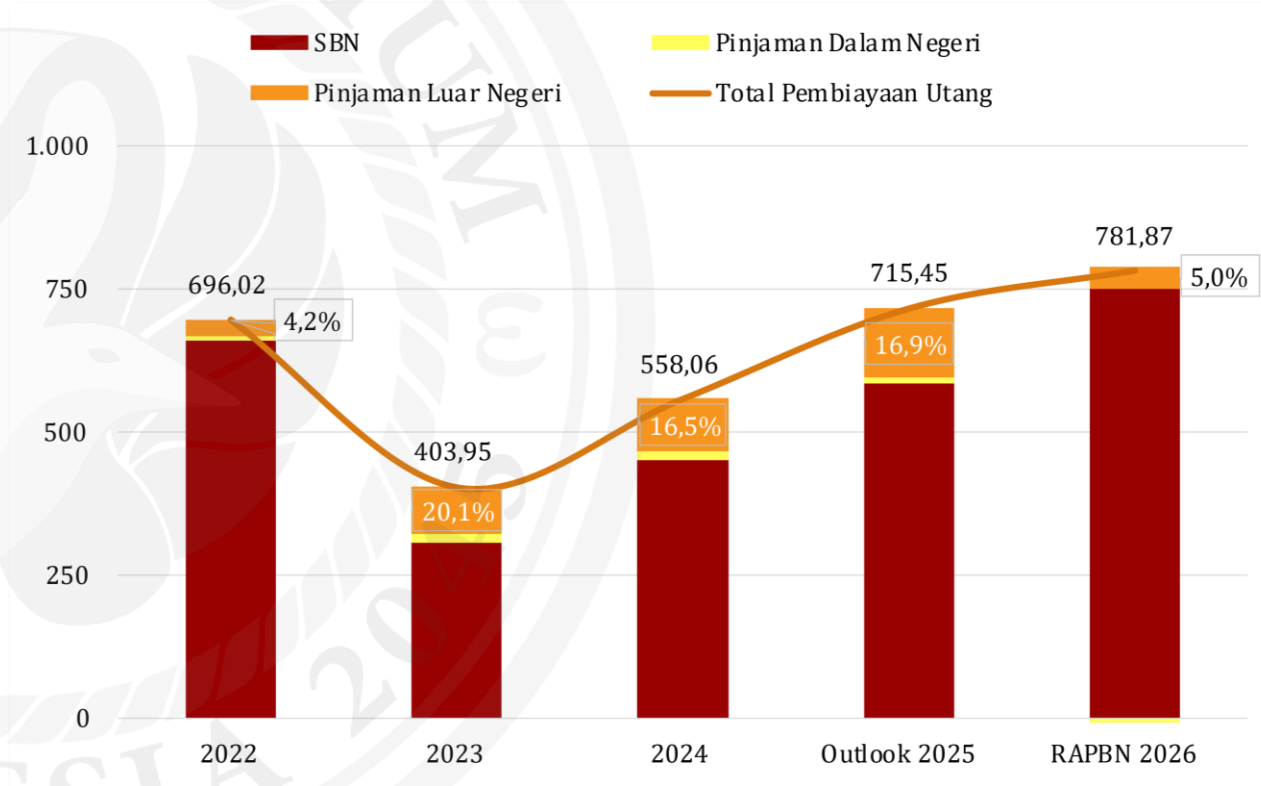
**3 Juta Rumah Rakyat
Rp57,7 triliun**



**Koperasi Desa Merah Putih
Rp181,8 triliun**



Tren Persebaran Utang Indonesia 2021-2026



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Rekomendasi

Belajar dari pengalaman **Mirage** dan **Garibaldi**

- Akuisisi alutsista berdasarkan kemampuan fiskal dan perhitungan kebutuhan MRO (*life cycle cost*)
- Menyeimbangkan semangat diversifikasi dengan pertimbangan kompatibilitas operasional (*interoperability*)
- Menyesuaikan akuisisi alutsista dengan kebutuhan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Buku Putih Pertahanan: skenario krisis jangka pendek dan menengah

- Menjadi rujukan rencana pertahanan yang secara jelas memuat ancaman militer
- Menunjukkan intensi pembangunan kekuatan Indonesia untuk penangkalan defensif
- Pengadaan berdasarkan kapabilitas (*capability-based*) alih-alih berdasarkan platform (*platform-based*)

Meningkatkan peran pengawasan **Komisi I DPR RI**

- Perencanaan pengadaan perlu dibuat berdasarkan perencanaan pendanaan di tengah keterbatasan fiskal
- Potensi jebakan utang (*debt trap*) masa depan akibat upaya penguatan postur dan industri pertahanan yang mengganggu situasi ekonomi
- Fokus pertumbuhan ekonomi 8%: bukan sekedar pinjaman luar negeri, ekonomi yang kuat diperlukan untuk menopang anggaran pertahanan 1,5% PDB (*prudent defense spending*)



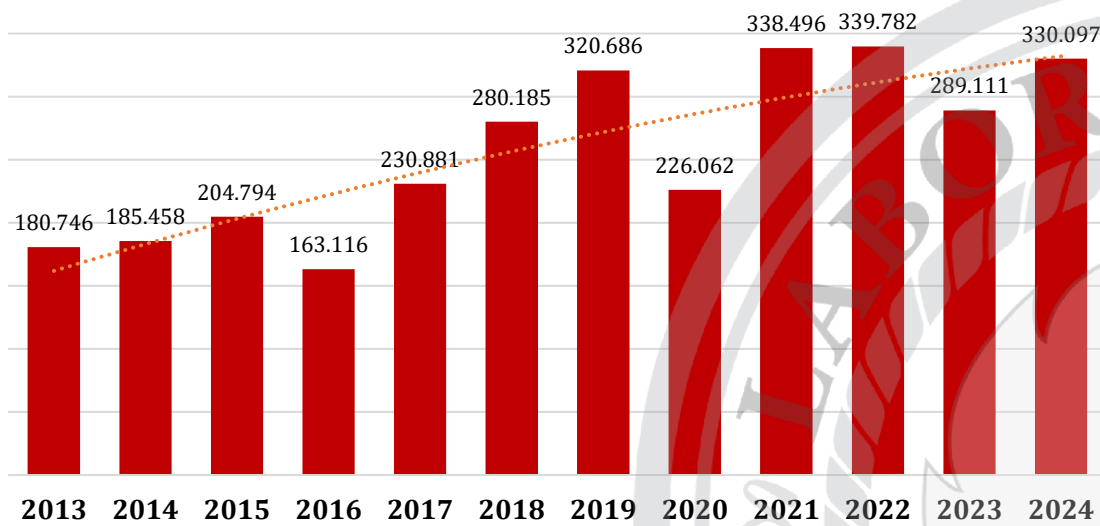
Gender Brief LAB 45

**Perlindungan Perempuan:
Landasan Arah Baru
Pemerintahan Prabowo-Gibran**

22 Oktober 2025

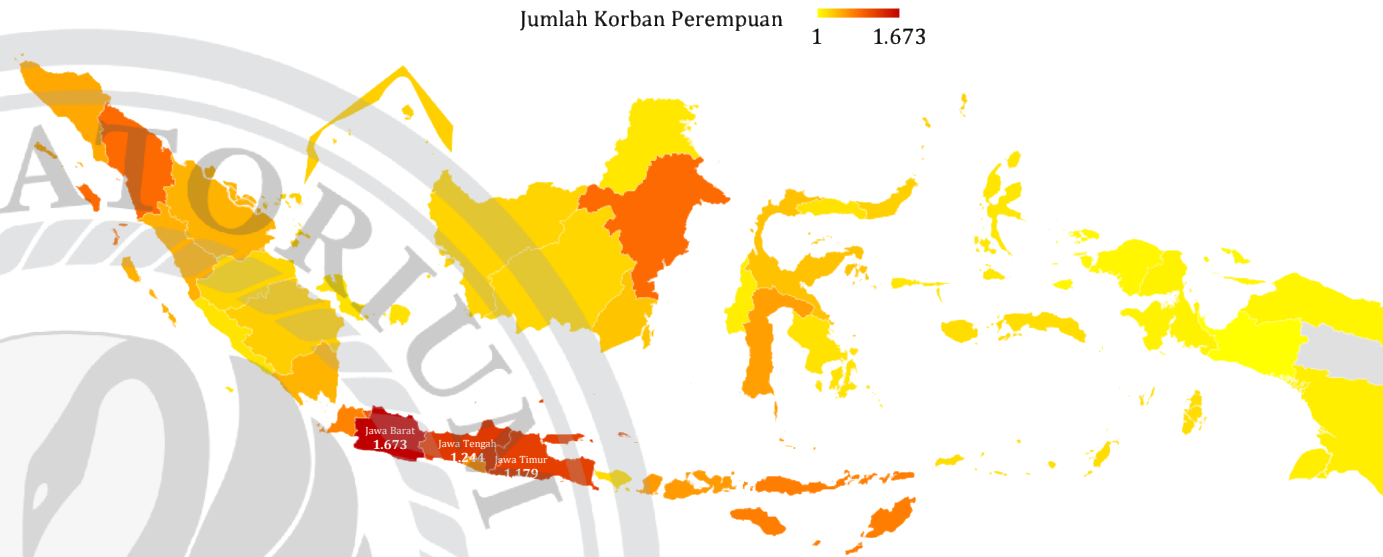
Kekerasan terhadap Perempuan

Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, 2013-2024



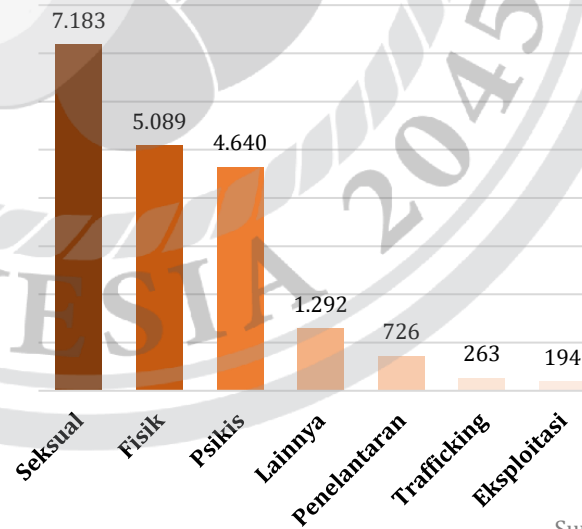
Sumber: CATAHU Komnas Perempuan (2025)

Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan, 2025

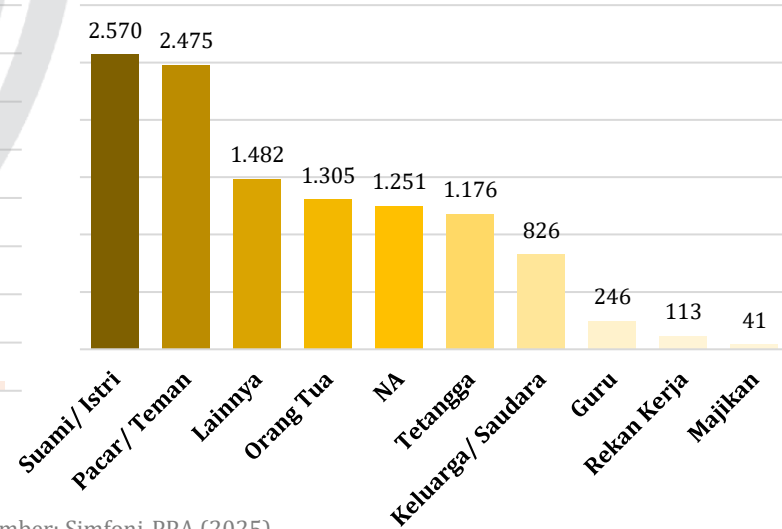


Sumber: Simfoni-PPA (2025)

Bentuk Kekerasan, 2025



Pelaku Berdasarkan Hubungan, 2025



Sumber: Simfoni-PPA (2025)

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan konsisten meningkat selama 12 tahun terakhir. Selain itu, catatan Simfoni-PPA sejak awal tahun 2025 juga menunjukkan masih banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, baik anak-anak maupun dewasa. Mereka masih menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan seksual, fisik, dan psikis. Ironisnya, sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat orang terdekat seperti suami/ istri atau pacar/ teman.

Situasi kritis ini semakin ironis ketika pemerintahan Prabowo mengesampingkannya dengan melakukan pemangkasan anggaran yang secara langsung berdampak pada upaya perlindungan perempuan.

Data kekerasan terhadap perempuan tahun 2025 yang diolah dari situs Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak ([Simfoni-PPA](#)) merupakan data sejak 1 Januari - 15 Oktober 2025 pukul 15.07 WIB.

Pemerintahan Prabowo-Gibran



Visi Misi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

- Memerkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan **Hak Asasi Manusia (HAM)** (Asta Cita 1)
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, **kesetaraan gender**, serta **penguatan peran perempuan**, pemuda, dan penyandang disabilitas (Asta Cita 4)
- Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil (Hasil Terbaik Cepat 1)
 - Penguatan kesetaraan gender dan **perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas** (Program Prioritas 10)

Indeks Ketimpangan Gender
Turun dari 0,421 (2024) → 0,394 (2029)

Kesenjangan Upah Gender
Turun dari 22,09% → 17%

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Naik hingga 56,7-60,89%

Imunisasi HPV
Cakupan 90% & Pra-eliminasi Kanker Serviks di 125 Kab/kota

Angka Kematian Ibu
Turun dari 189/100.000 (2020) → 77 (2029)

Median Usia Kawin Pertama
Naik menjadi 22,8 tahun

Perkawinan Anak
Turun hingga 5,03%

Kekerasan Seksual
Turun hingga 3,19%

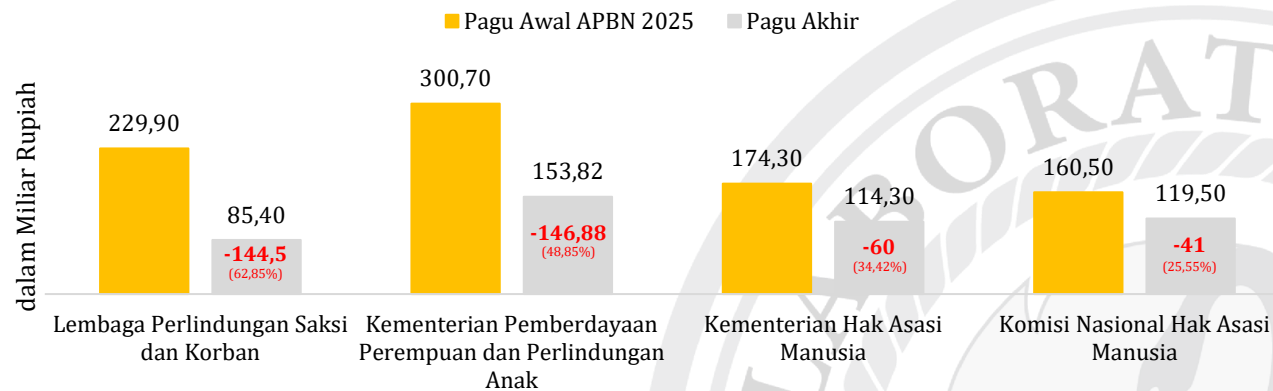
Pendidikan Perempuan Minimal SMA 40,27% & Literasi Digital Naik 3,76

Target-target RPJMN 2025-2029

Pemerintahan Prabowo menaruh perhatian terhadap isu perempuan dalam **Asta Cita**. Target-target yang tertuang dalam **RPJMN V**, serta pembentukan **Ruang Bersama Indonesia (RBI)** memang menjadi jawaban atas visi-misi tersebut. Namun, **pemotongan anggaran terhadap lembaga/Kementerian terkait pemberdayaan perempuan, efisiensi program MBG, dan ketidakjelasan pengesahan RUU PPRT**, kembali menjadi pertanyaan akan keseriusan pemerintah dalam mencapai target pemberdayaan perempuan dalam lima tahun ke depan. Gerakan-Gerakan Rimpang, seperti terlihat melalui aksi Indonesia Gelap (di dalamnya terdapat Aliansi Emak-emak), menjadi simbol menuntut adanya perubahan-perubahan dari sisi kebijakan yang lebih sesuai dengan target.

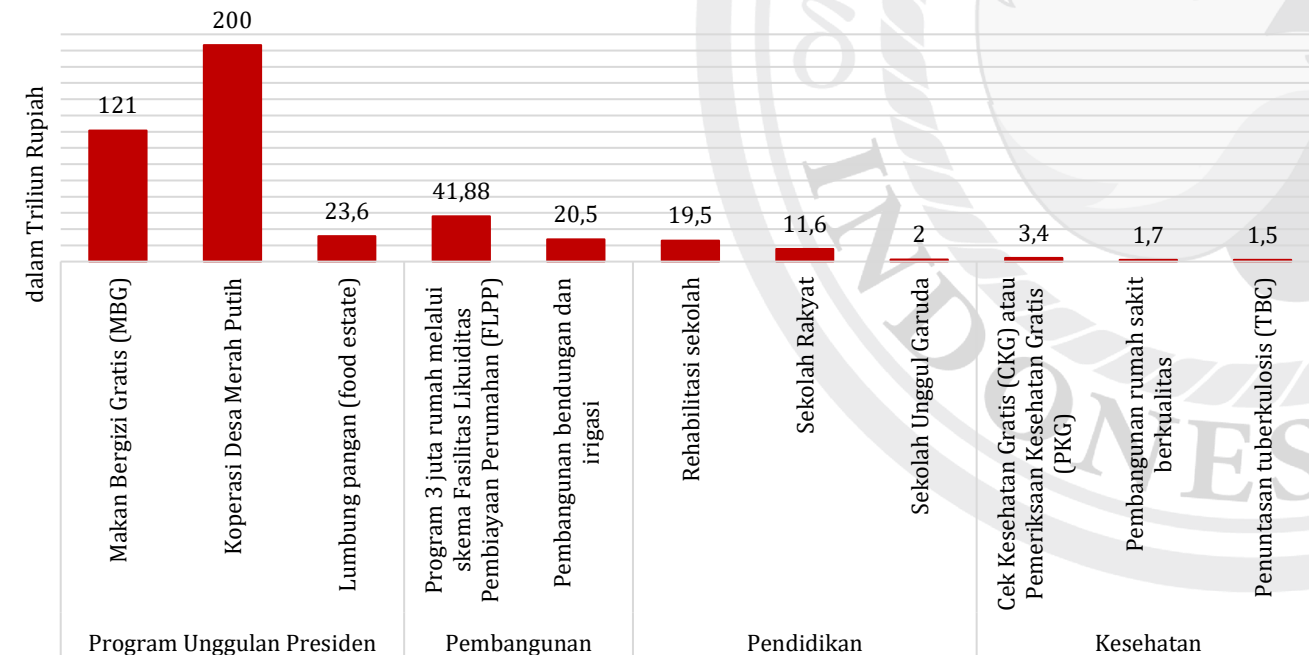
Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas Presiden

Pemangkasan Anggaran pada K/L terkait Perlindungan Perempuan



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengamanatkan efisiensi belanja di seluruh K/L, termasuk sektor pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pendidikan, dan kesehatan yang juga mendapatkan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan. Pada **K/L terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan**, LPSK kehilangan 62,85% anggarannya, berisiko melemahkan perlindungan saksi dan korban. Sementara itu, anggaran KemenPPPA turun 48,85% menjadi Rp153,7 miliar, dengan layanan pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan yang tidak mendapatkan pendanaan

Anggaran pada 11 Program Prioritas



Walaupun fokus anggaran terbesar kini bergeser ke Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah tetap menempatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional berskala besar.

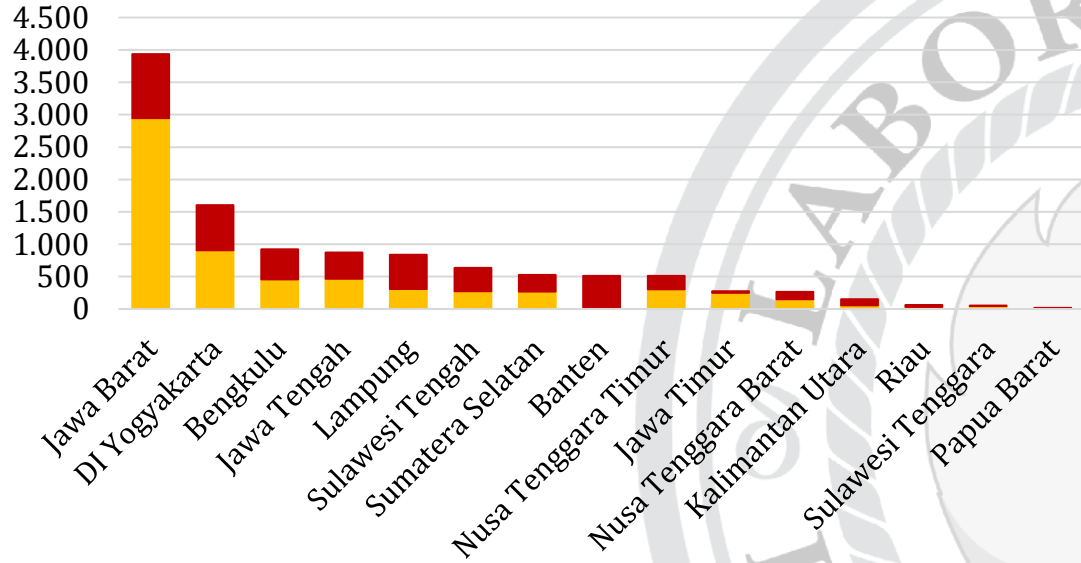
Namun, saat ini tidak ada anggaran besar yang diposkan pada kementerian/lembaga atau program perlindungan perempuan, kecuali MBG yang sebagian menyasar ibu hamil. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan belum menjadi prioritas utama dalam struktur APBN.

Selain itu, pelaksanaan MBG di lapangan masih menghadapi banyak persoalan keamanan dan pengawasan mutu, dengan munculnya kasus keracunan pada anak sekolah dan ibu hamil di sejumlah daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek perlindungan dan keselamatan publik belum sepenuhnya diperhitungkan dalam desain dan implementasi program prioritas nasional.

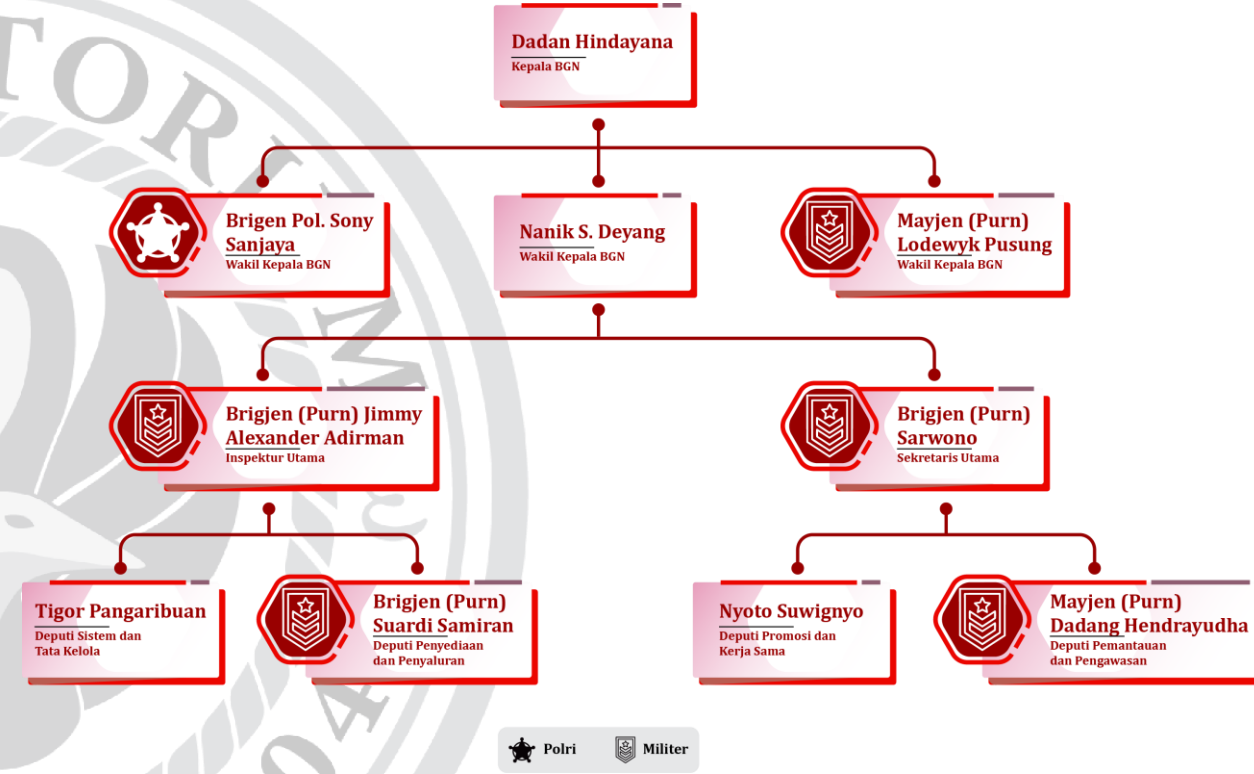
Paradoks Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN)

Keracunan MBG per 25 September

■ Data CISDI ■ Data BGN

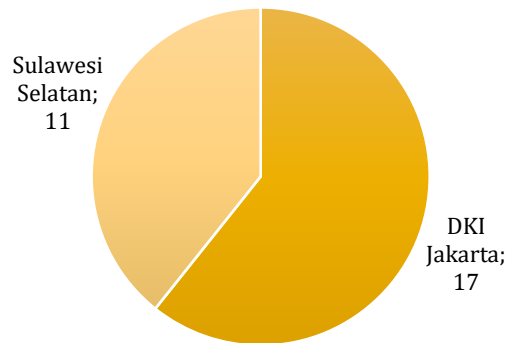


Struktur Kepengurusan BGN

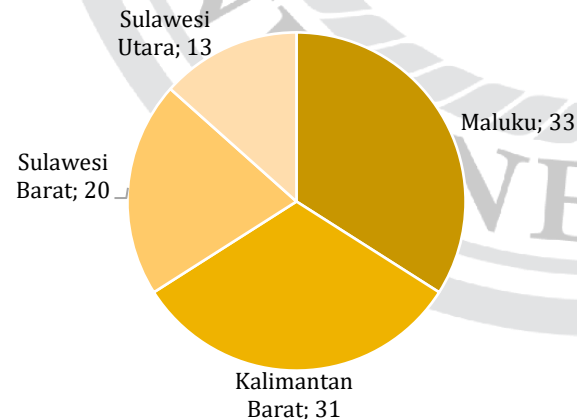


Polri Militer

Keracunan MBG per 25 September—BGN



Keracunan MBG per 25 September—CISDI



- Total kasus keracunan MBG

A. CISDI : 6.611

B. BGN : 4.690

- Tidak ada ahli gizi dalam struktur utama BGN

Tujuh Rekomendasi

Kaji ulang program/kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan (seperti Ruang Bersama Indonesia)

Evaluasi menyeluruh program MBG

Memperkuat KemenPPPA dan Komnas Perempuan dengan anggaran memadai

Menetapkan isu kesetaraan gender menjadi prioritas kebijakan strategis

Jangan lebur Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan Dinas Sosial di daerah-daerah

Mengakui peristiwa pemerkosaan massal dan HAM berat masa lalu

Segera Sahkan RUU PPRT





TERIMA KASIH



Angka Statistik "Cantik", Hari-hari yang Pahit

Divisi Ekonomi Politik

22 Oktober 2025

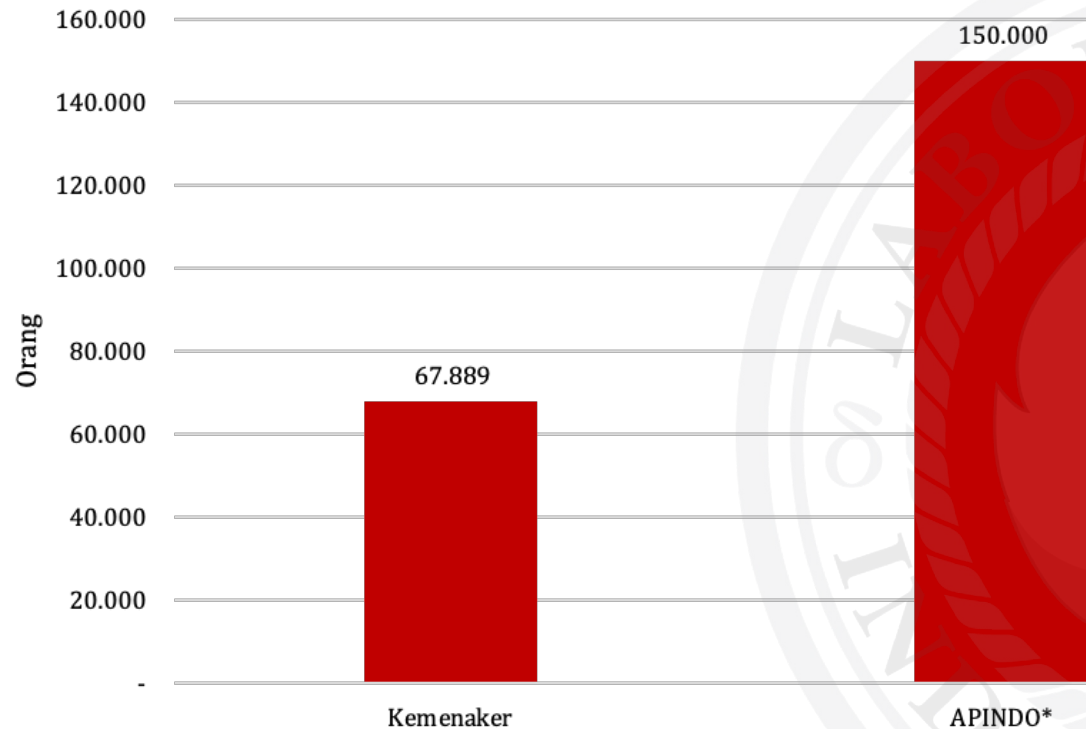
Kondisi Makroekonomi

Indikator	Terkini (Oktober 2025)	Titik Kritis	Penilaian
Pertumbuhan Ekonomi	Q2-2025: 5,12%	4,73%	Stabil dan berdaya tahan, namun akselerasi perlu dijaga agar target tahunan 5,2% tercapai
Inflasi	September 2025: 2,65%	±1,5-3,5%	Terkendali, tetapi perlu mewaspadaikan tekanan harga pangan ke depannya
Pengangguran	Februari 2025: 4,76%	-	Relatif rendah dan terus mengalami penurunan semenjak Covid-19 yang menandakan perbaikan pasar kerja
Harga Minyak Bumi WTI (Dolar AS)	60,88 Dolar AS	90,2 Dolar AS	Berdampak positif terhadap postur fiskal
Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS	Rp16.611	Rp17.710	Meski berada di bawah titik kritis, depresiasi Rupiah perlu diwaspadai karena melewati asumsi makro Rp16.000 dalam APBN 2025
IHSG	8.118,3	-	Menguat yang mencerminkan sentimen pasar cukup optimis

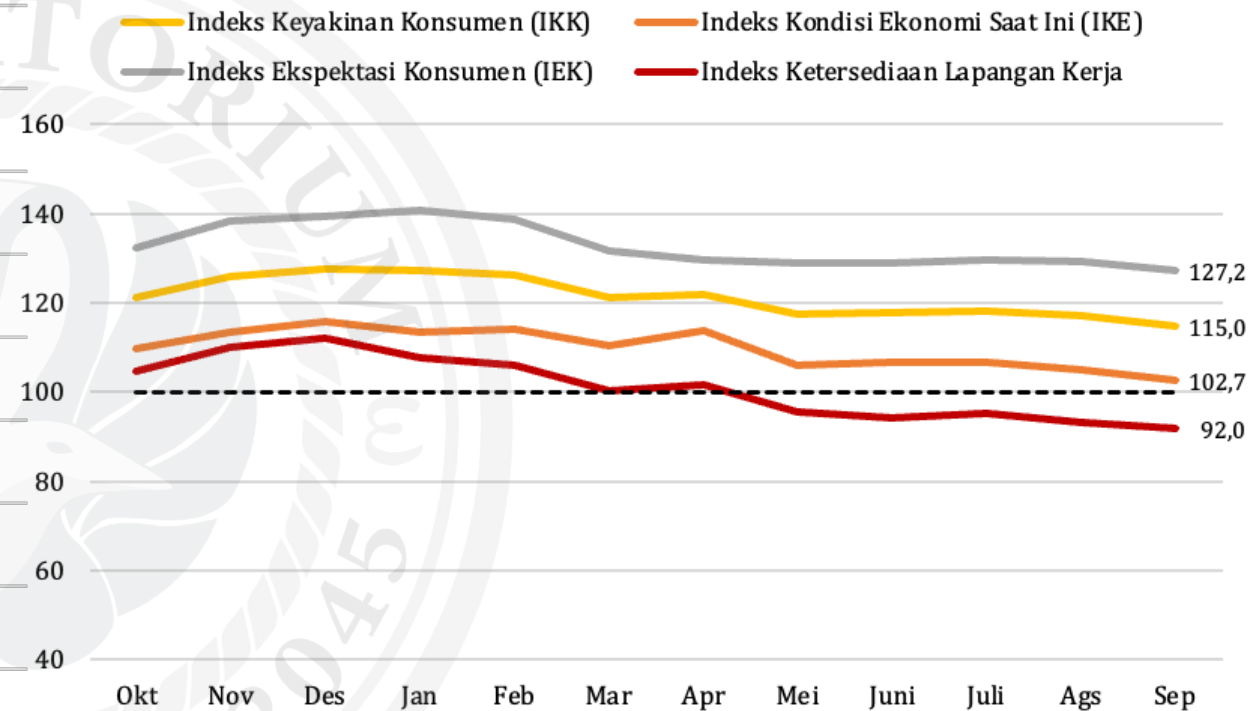
Indikator makroekonomi dalam satu tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif stabil dan menunjukkan ketangguhan. Tidak ada tanda yang signifikan untuk terjadinya krisis.

Kondisi Mikroekonomi

Klaim Jumlah PHK



Indeks IKK, IEK, IKE, dan Ketersediaan Lapangan Kerja



Kegelisahan masyarakat tercermin dari data-data mikroekonomi. PHK dan daya beli menjadi sebagian dari indikator lesunya perekonomian nasional. IKK mengalami tren yang melemah hingga bulan September, bahkan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja sudah berada pada zona pesimis sejak Mei 2025.

Program Unggulan

Makan Bergizi
Gratis

Danantara

Food Estate

Koperasi Desa
Merah Putih

Program 3
Juta Rumah

Ketahanan
Energi

Multiplier
Effect?

Langkah ke Depan

Memastikan Keberadaan dan Aksesibilitas Lapangan Kerja

- Mengintegrasikan target penyerapan tenaga kerja dalam desain dan pelaksanaan program *flagship* pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, Koperasi Desa Merah Putih, Ketahanan Energi, Danantara, dst.

Mendorong Transparansi Program Pemerintah dan Membangun Kepercayaan Masyarakat

- Implementasi *dashboard* lintas sektor yang secara terbuka menampilkan progres, kendala, dan alokasi sumber daya dari program-program *flagship*.



Terima Kasih



Media Brief

Satu Tahun Kabinet Merah Putih: Kepuasan Terjaga, Komunikasi Kurang Siaga

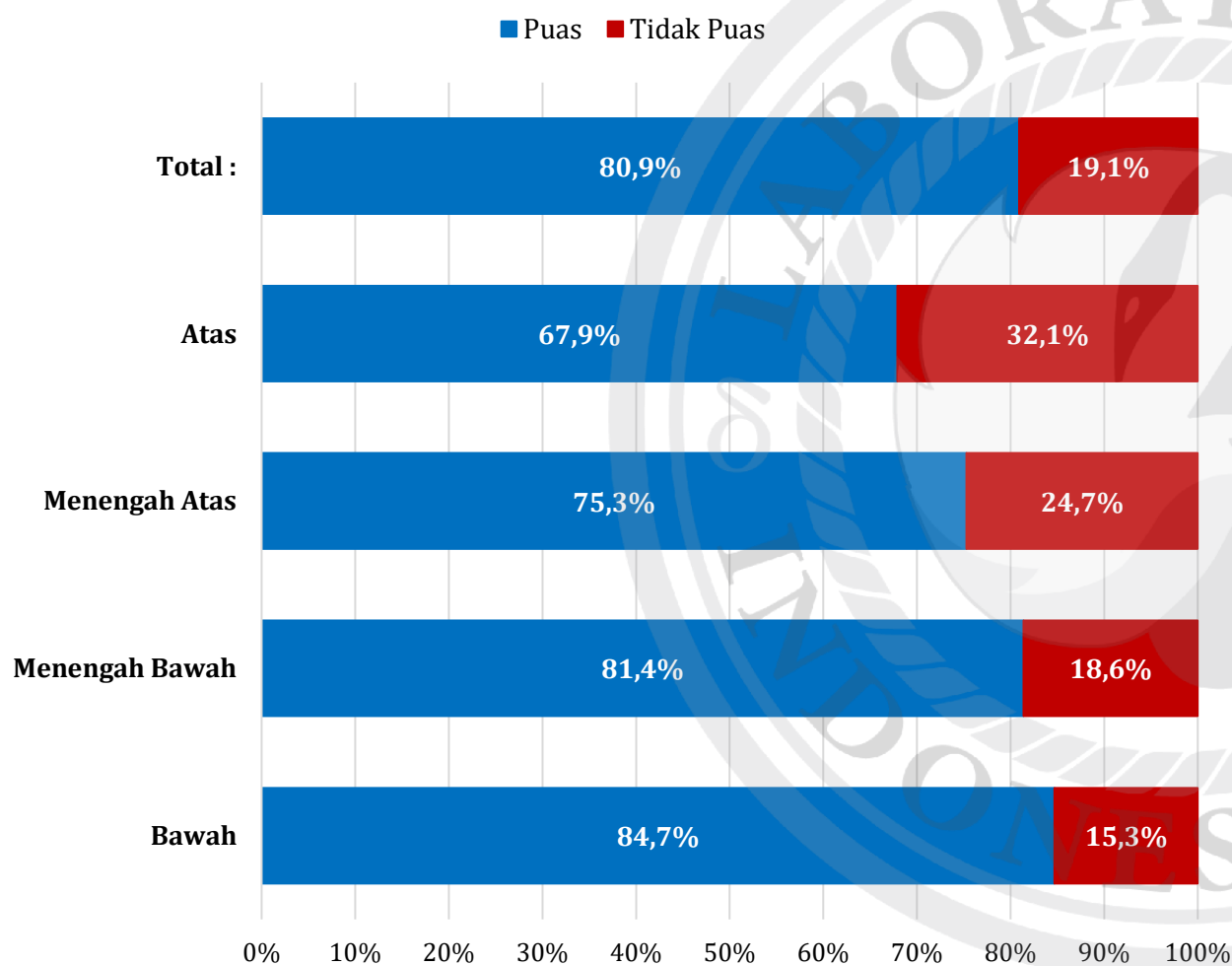
(Kaya Narasi, Miskin Artikulasi)

Maha Data LAB 45

22 Oktober 2025

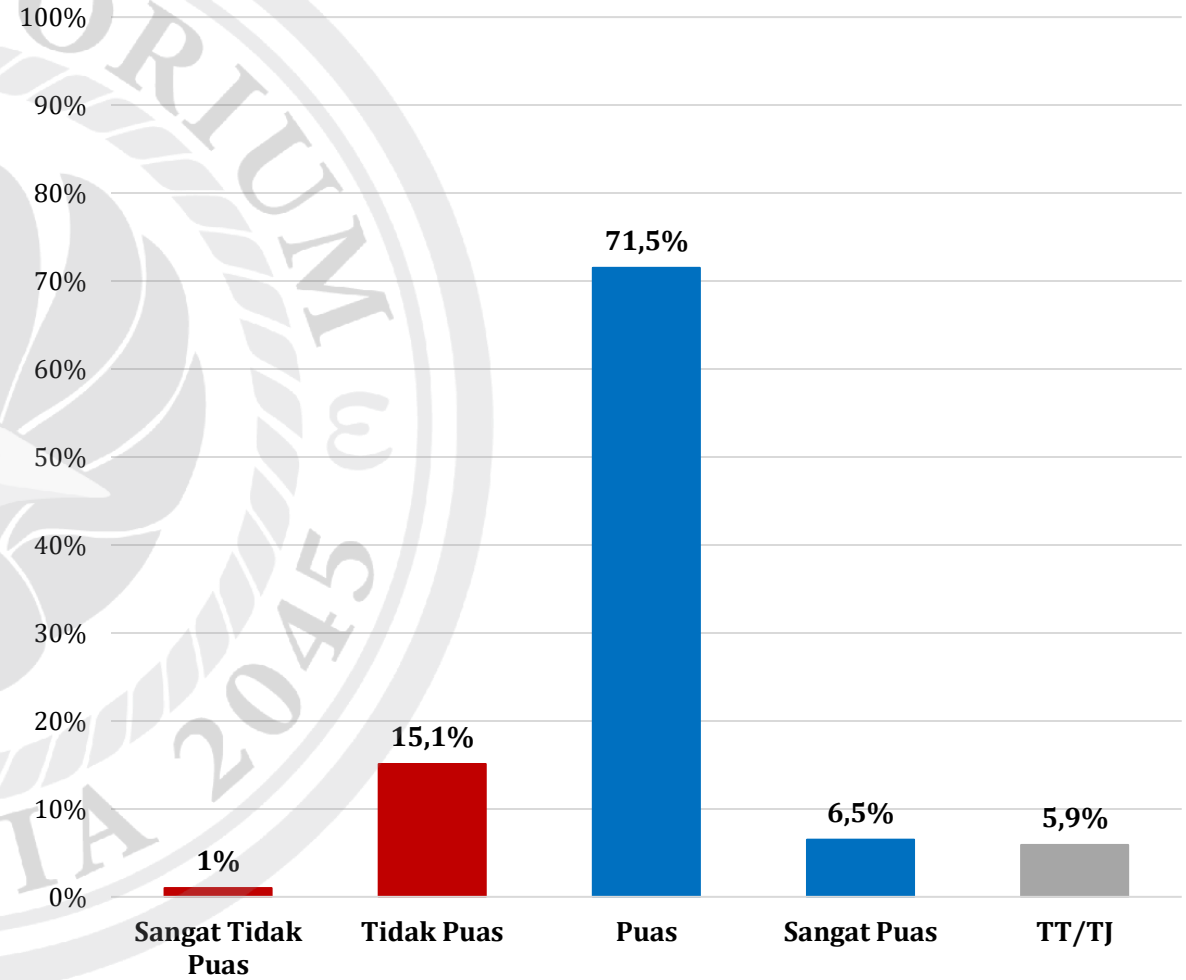
Tingkat Kepuasan Masyarakat

Derajat Kepuasan terhadap 100 Hari Kinerja Pemerintahan Berdasarkan Status Sosial Ekonomi



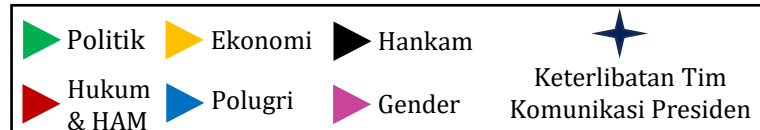
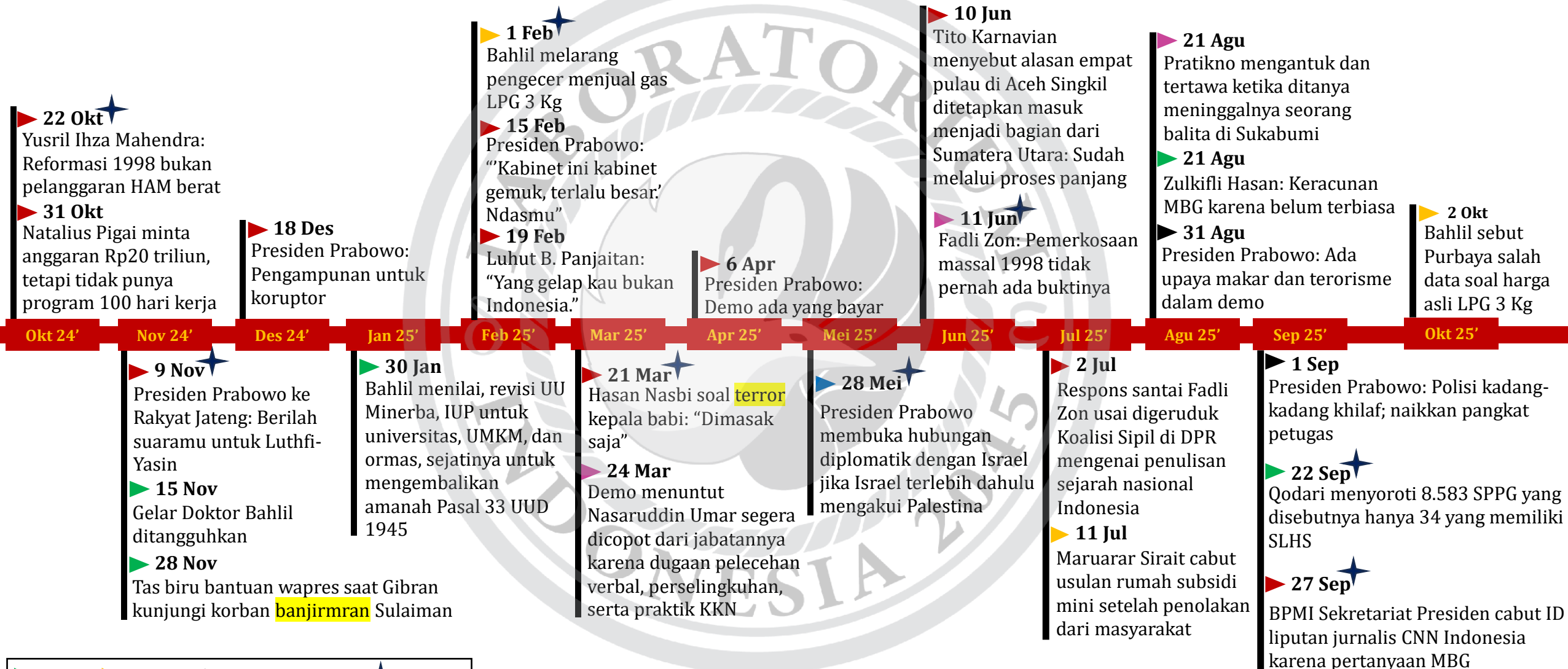
Sumber: [KOMPAS.id](https://www.kompas.id) (2025)

Kepuasan terhadap Kinerja Pemerintah di Bawah Kepemimpinan Prabowo



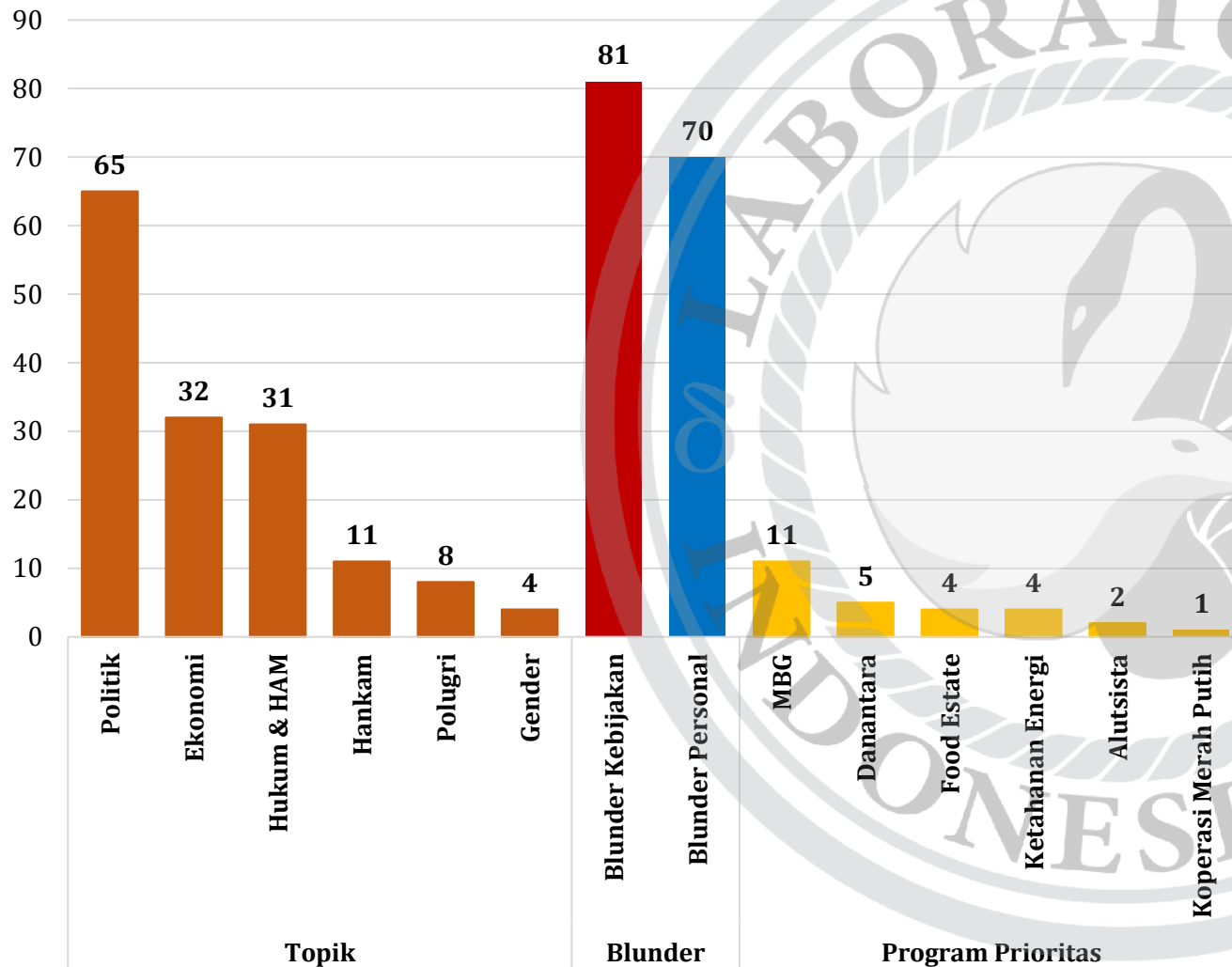
Sumber: [Indonesian Social Survei](https://www.indonesiansocialsurvey.com) (2025)

Blunder dan Keterlibatan Tim Komunikasi Presiden



Kategori Blunder Pemerintah

Blunder Berdasarkan Topik dan Program Prioritas
(N=151)



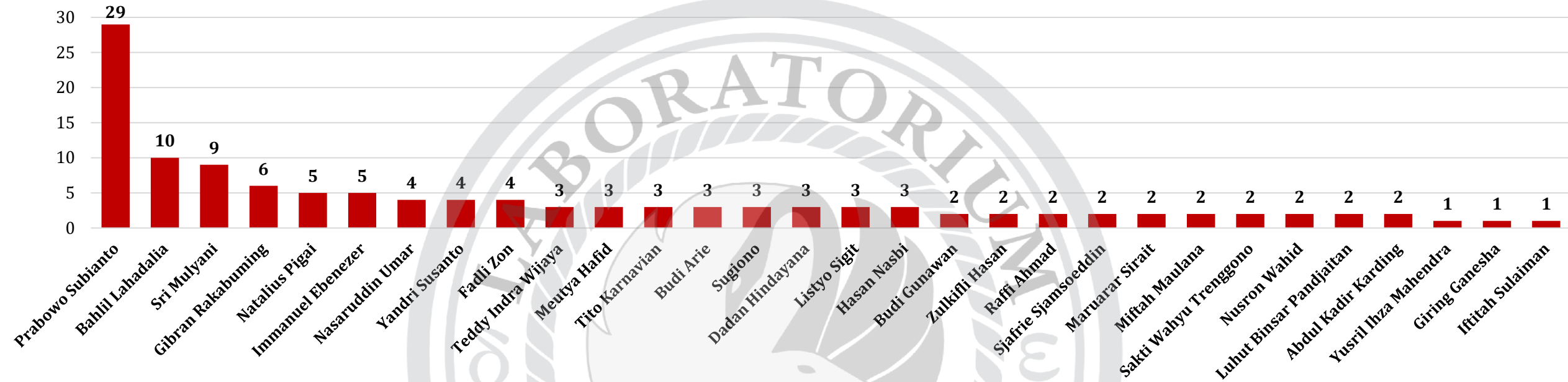
Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2025)

Selama satu tahun pemerintahan Prabowo, blunder terbanyak terkait topik politik, ekonomi, hukum dan HAM.

Blunder yang membuat kegaduhan di publik antara lain: #KaburAjaDulu/#IndonesiaGelap, kenaikan PPN 12%, LPG 3 kg, kisruh program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyangkalan pemerkosaan massal 1998, teror kepala babi, hingga penangguhan gelar doktor Bahlil. Jenis blunder yang ada lebih banyak terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Sementara itu, dalam konteks blunder program prioritas presiden, MBG menjadi topik yang paling sering menjadi blunder. Salah satunya adalah kenaikan PPN 12% yang dikabarkan untuk MBG, blunder Zulkifli Hasan terkait keracunan MBG karena korban tidak biasa memakan menu MBG, serta respons pemerintah terhadap keluhan anak-anak atas rasa masakan MBG.

Data blunder yang ditampilkan dikompilasi sejak 20 Oktober 2024 hingga 8 September 2025.

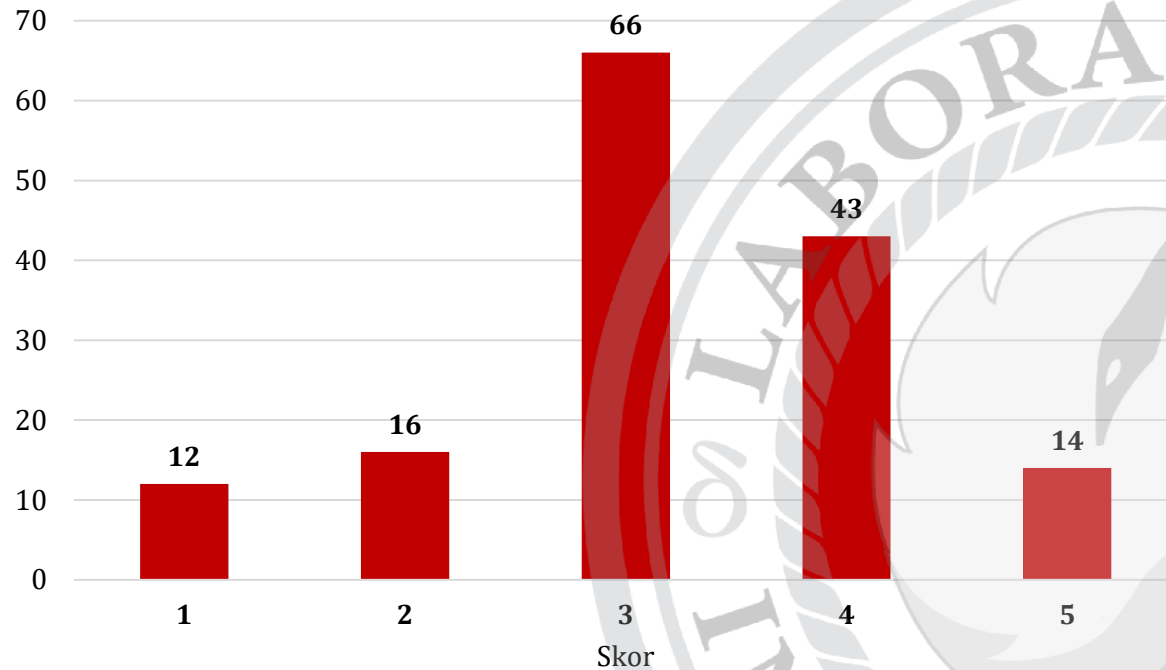
30 Tokoh dengan Blunder Tertinggi



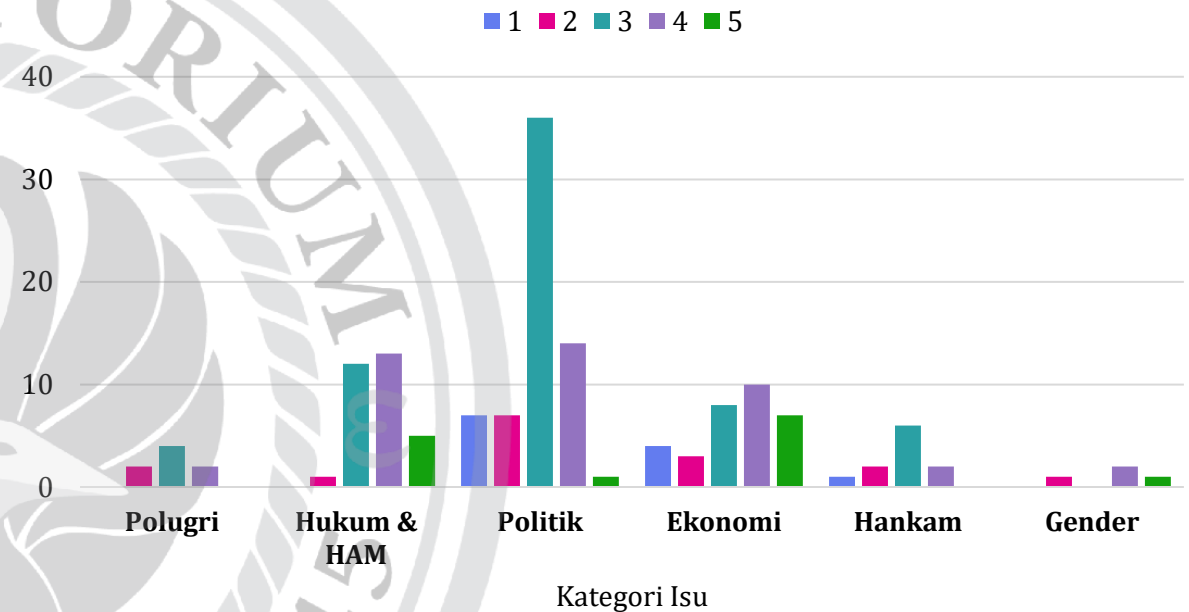
Dari 30 pejabat yang tercatat melakukan blunder, **Presiden Prabowo** menempati posisi tertinggi dengan isu cawe-cawe dirinya di Pilkada Jawa Tengah, pernyataan 'Ndasmu' dalam konteks respons pada kritik program MBG, kabinet gemuk, kedekatannya dengan Presiden Jokowi, blunder pengakuan terhadap Israel apabila Israel mengakui Palestina, tidak adanya permintaan maaf atas kerusuhan demonstrasi di akhir Agustus dan pernyataan demonstrasi yang terjadi mengarah pada terorisme dan makar, serta penghapusan hukuman koruptor ketika sudah mengembalikan uang. Kedua, **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia** terkait penangguhan gelar Doktor; polemik izin tambang untuk universitas, UMKM dan Ormas; izin tambang di kawasan Raja Ampat, Papua; larangan penjualan LPG 3 kg dan peraturan pembelian LPG 3KG dengan KTP. Ketiga, **mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani**, melakukan blunder terkait PPN 12%; efisiensi anggaran yang memotong anggaran pendidikan dan kesehatan; dan pemecatan tenaga honorer. **Wakil Presiden Gibran Rakabuming** terpantau melakukan sejumlah blunder seperti program Lapor Mas Wapres, pertemuan dengan pengemudi ojek *online* di Istana Wapres dan membagikan tas biru bantuan sosial bertuliskan Bantuan Wapres. Di luar itu, **Fadli Zon** memicu polemik dengan pernyataannya soal pemerkosaan massal 1998 dan wacana penulisan ulang sejarah Indonesia. Sementara itu, **Luhut Binsar** dikecam atas respons sinisnya terhadap aksi #IndonesiaGelap lalu, serta menyebut gerakan purnawirawan yang bertujuan untuk memakzulkan Gibran sebagai tindakan yang kampungan. **Tito Karnavian** turut tersorot akibat sengketa empat pulau di perbatasan Aceh-Sumut.

Klasifikasi Blunder

Jumlah Blunder Berdasarkan Skor



Jumlah Blunder Berdasarkan Skor dan Kategori Isu



Selama satu tahun pemerintahan Prabowo, terdapat 151 blunder-gaduh di media daring maupun media sosial. Di antaranya 14 isu yang viral di media daring dan media sosial, menimbulkan amok di masyarakat, serta menimbulkan pergantian/penundaan kebijakan bermasalah. 43 isu lainnya merupakan isu yang viral di media daring dan media sosial dan mendapatkan klarifikasi dari pemerintah. 66 isu merupakan isu yang banyak diangkat di media sosial atau media daring, namun viralitasnya tidak bertahan lama dan mendapatkan klarifikasi dari pemerintah. 16 isu terpantau sebagai isu yang ramai di media sosial atau media daring dengan intensitas yang cukup tinggi. 12 isu lainnya merupakan isu yang hanya viral di media sosial dengan tingkat viralitas yang tidak bertahan lama.

Catatan Kritis

1

Terlihat **arogansi** beberapa pejabat pemerintah ketika merespons isu dan kritik publik.

2

Pemerintah terkesan **tidak memiliki tim komunikasi yang baik**, sehingga terlihat tidak siap ketika menghadapi *doorstop*.

3

Terkadang terjadi **perbedaan narasi antarpejabat** atau kementerian terkait satu isu yang sama, bahkan beberapa kali saling membantah/menyerang satu sama lain.

4

Hampir **tidak terlihat respons cepat dan tepat** dari tim komunikasi presiden, terutama pada isu yang menjadi program prioritas presiden.

5

Kantor Komunikasi Kepresidenan/Badan Komunikasi Pemerintah, juru bicara presiden, dan tim komunikasi presiden di bawah Kementerian Sekretariat Negara, selama satu tahun **tidak berfungsi sebagaimana mestinya**.

Rekomendasi

- 1 Menetapkan **juru bicara utama** presiden dengan kewenangan penuh untuk menyelaraskan semua narasi dan data sebelum dirilis ke publik.
- 2 Perlu ditunjuk **satu juru bicara** yang bertanggung jawab atas keseluruhan program prioritas presiden, atau **juru bicara khusus untuk masing-masing program** prioritas tersebut. Posisi ini penting untuk memastikan konsistensi pesan dan menghindari kontradiksi antarpejabat.
- 3 Tim komunikasi K/L **berkoordinasi** dengan tim juru bicara utama presiden.
- 4 *Press briefing resmi* dari tim komunikasi presiden setidaknya satu atau dua kali dalam seminggu, atau dalam **situasi mendesak atau krisis** (Seperti kerusuhan akhir Agustus, klarifikasi substansi perbincangan Prabowo-Trump yang bocor, dll.)
- 5 **Standardisasi kualifikasi** tim komunikasi presiden yang sebaiknya memiliki pengalaman dengan latar belakang komunikasi politik yang baik.
- 6 Pejabat harus **disiplin membedakan** antara **opini pribadi** (sebaiknya harus dihindari) dan **posisi resmi** pemerintah dalam menanggapi isu.
- 7 Penguatan **koordinasi antarlembaga** agar tidak ada lagi implementasi kebijakan yang ditarik oleh presiden (Seperti kasus PPN, Gas LPG).
- 8 Mendorong **narasi yang inklusif**, mengedepankan empati di tengah situasi krisis.



TERIMA KASIH